

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1) Desentralisasi melalui PNDS

PNDS di Ermera memperkuat peran pemerintahan suco dengan pelimpahan kewenangan dan dana. Pemerintah lokal tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan pusat, tetapi menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan. Musyawarah suco menjadikan proses pembangunan lebih demokratis, bottom-up, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang dibangun menjadi bukti nyata manfaat langsung bagi warga.

2) Partisipasi masyarakat sebagai pilar utama

Warga terlibat aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, bukan hanya tenaga kerja. Tingginya partisipasi memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan transparansi, dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Partisipasi ini juga menciptakan kontrol sosial yang efektif, memperlihatkan tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat akar rumput..

3) Faktor pendukung dan hambatan

Keberhasilan PNDS ditopang oleh komitmen pemerintah lokal, partisipasi warga, serta dukungan teknis tim PNDS município. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan dana pemeliharaan, kapasitas teknis aparatur suco yang masih rendah, dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi membutuhkan sinergi berkelanjutan agar efektif.

4) Kontribusi terhadap kualitas layanan publik

PNDS meningkatkan aksesibilitas warga ke pendidikan, kesehatan, pasar, dan aktivitas sosial-ekonomi melalui pembangunan jalan. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga sosial-ekonomi: memperlancar perdagangan, memperkuat integrasi sosial, dan membuka peluang ekonomi baru. PNDS berperan sebagai katalisator pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah, lembaga pelaksana *PNDS*, dan masyarakat lokal guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis desentralisasi:

1. Memperkuat kapasitas aparatur suco

Aparatur suco perlu dibekali dengan pelatihan teknis berkelanjutan dalam manajemen proyek, pengelolaan anggaran, dan pengawasan kualitas pekerjaan. Selain itu, aspek kepemimpinan dan komunikasi juga harus ditingkatkan agar aparatur mampu menjadi fasilitator musyawarah warga negara yang inklusif. Dengan kapasitas yang lebih baik, pelimpahan kewenangan akan berjalan efektif dan akuntabel.

2. Memfasilitasi partisipasi warga negara secara berkelanjutan

Forum musyawarah suco harus difasilitasi secara rutin agar warga negara memiliki kesempatan berkesinambungan untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pembangunan. Transparansi pengelolaan dana *PNDS* perlu ditingkatkan melalui laporan terbuka, sementara pemberdayaan kelompok pemuda, perempuan, dan organisasi lokal akan memastikan partisipasi lebih inklusif.

3. Meningkatkan alokasi dana pemeliharaan dan koordinasi lintas lembaga

Pemerintah pusat dan *município* perlu menyediakan skema pendanaan khusus untuk pemeliharaan infrastruktur jalan agar keberlanjutan pembangunan terjamin. Selain itu, mekanisme koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui forum rutin, sistem informasi pembangunan yang terbuka, dan standar kerja yang jelas, sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya secara sinergis.

4. Memperluas model *PNDS* ke sektor layanan publik lain

Keberhasilan *PNDS* di sektor jalan dapat dijadikan model untuk sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pengelolaan lingkungan. Dengan melibatkan warga negara dalam perencanaan dan pengawasan, pembangunan di sektor-sektor tersebut akan lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga manfaat desentralisasi semakin luas bagi kesejahteraan masyarakat.